

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERANAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DIKECAMATAN
KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu Sosial
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



ARIF ANDRIANSYAH

NPM : 147310429

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU

2019

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

Peserta Ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIF ANDRIANSYAH
NPM : 147310429
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman
Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir
Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya nyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademi dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 April 2019

Penulis

ARIF ANDRIANSYAH

PERANAN CAMAT DALAM MENNGKOORDINASIKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

ARIF ANDRIANSYAH

Kata kunci : Peranan, Koordinasi, Ketentraman dan Ketertiban

Penelitian ini dilatar belakangi dari fenomena-fenomena yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum, adapun fenomena ketentraman seperti pencurian, perkalahan warga, perjudian dan balapan liar dan fenomena ketertiban seperti adanya penertipan pedagang dipasar serta penertipan lahan parkir sepeda motor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Sejalan dengan penelitian ini populasi yang penulis gunakan yaitu Aparatur Kecamatan, Kapolsek, Lurah, Kepala Desa, Tokoh Adat dan Jumlah Masyarakat. Untuk penarikan sampel penulis menggunakan 2 teknik yaitu sensus atau pengambilan sampel jenuh yaitu teknik penarikan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini dikarenakan jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 30 orang dan purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Camat Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Kemudian untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dilapangan yang penulis lakukan, Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban Umum yaitu berada pada kategori Cukup Berperan dengan tanggapan responden 50 dari 70 atau 49,75% yang berada pada interval 34% - 66%. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan koordinasi Kecamatan Kampar Kiri Hilir yaitu; banyak dari komponen perangkat desa maupun yang terkait tidak menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh camat, camat beserta perangkat desa maupun yang terkait harus focus dalam membangun kembali siskamling, koordinasi yang tidak efektif menyebabkan Camat dengan satpol pp dalam menjalankan tugasnya tidak berjalan dengan baik.

***THE FLEET ROLE IN COORDINATING GENERAL PLANNING AND
PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL IN KECAMATAN KAMPAR KIRI
HILIR KAMPAR DISTRICT***

ABSTRACT

ARIF ANDRIANSYAH

Keywords: Role, Coordination, Peace and Order

This research is based on phenomena related to peace and public order, as well as tranquility phenomena such as theft, citizen fights, gambling and wild races and order phenomena such as the presence of traders in the market as well as the imposition of motorcycle parking. The purpose of this study was to determine the role of the subdistrict head in coordinating peace and public order in Kampar Kiri Hilir sub-district, Kampar Regency. In line with study the population that the authors use is the apparatus of the sub-district police chief of the village head of the traditional village head and the number of people. For sampling the author uses two techniques, namely census or saturated sampling, namely sampling technique if all members of the population are used as samples This is because the population is relatively small or less than 30 people and purposive sampling is a deliberate sampling technique. Researchers determine their own samples taken because there are certain considerations the author uses primary data and secondary data obtained from the Kampar Kiri Hilir sub-district office, Kampar Regency. Then to collect the author's data using interview questionnaire and documentation observation technique. From the results of research in the field that the authors do the role of the subdistrict head in coordinating peace and public order that is in the moderately role category with responses of respondents 50 of 70 or 49.75% which are in the interval of 34% to 66%. The factors that inhibit the implementation of the coordinating of the lower left Kampar Sub-District are that many of the village apparatus and related components do not attend meetings held by the sub-district head and the village or related must focus on rebuilding Siskamling ineffective coordination causes the Camat with Satpol PP to carry out their duties not going well

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang tidak terhingga penulis ucapkan, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “ Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar”. Ini penulis tulis untuk diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman ilmu serta pengalaman pribadi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab naskah skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal ini penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari bahwasannya dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu, sehubungan dengan itu secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL, selaku Rektor UIR yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Dr. H. Moris Yogya, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

3. Bapak Budi Mulianto, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan saran beserta kritik sedari awal sampai pada Skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Hj. Monalisa, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan membagi serta menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Syaprianto, S.sos.,M.IP Selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan membagi serta menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Ayah dan ibu tercinta sebagai idola dan motivator terbaik yang telah memberikan doa dan segalanya kepada penulis baik yang berbentuk moril maupun materil.
7. Untuk teman-teman terdekatku serta rekan-rekan seperjuangan beserta keluarga besar IP F angkatan 2014 yang sama-sama mengali ilmu merajut masa depan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Penulis Memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau yang berperan dalam penyelesaian Skripsi ini selalu diberikan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah beliau berikan kepada penulis semasa perkuliahan di Universitas Islam Riau serta untuk rekan-rekan seperjuangan

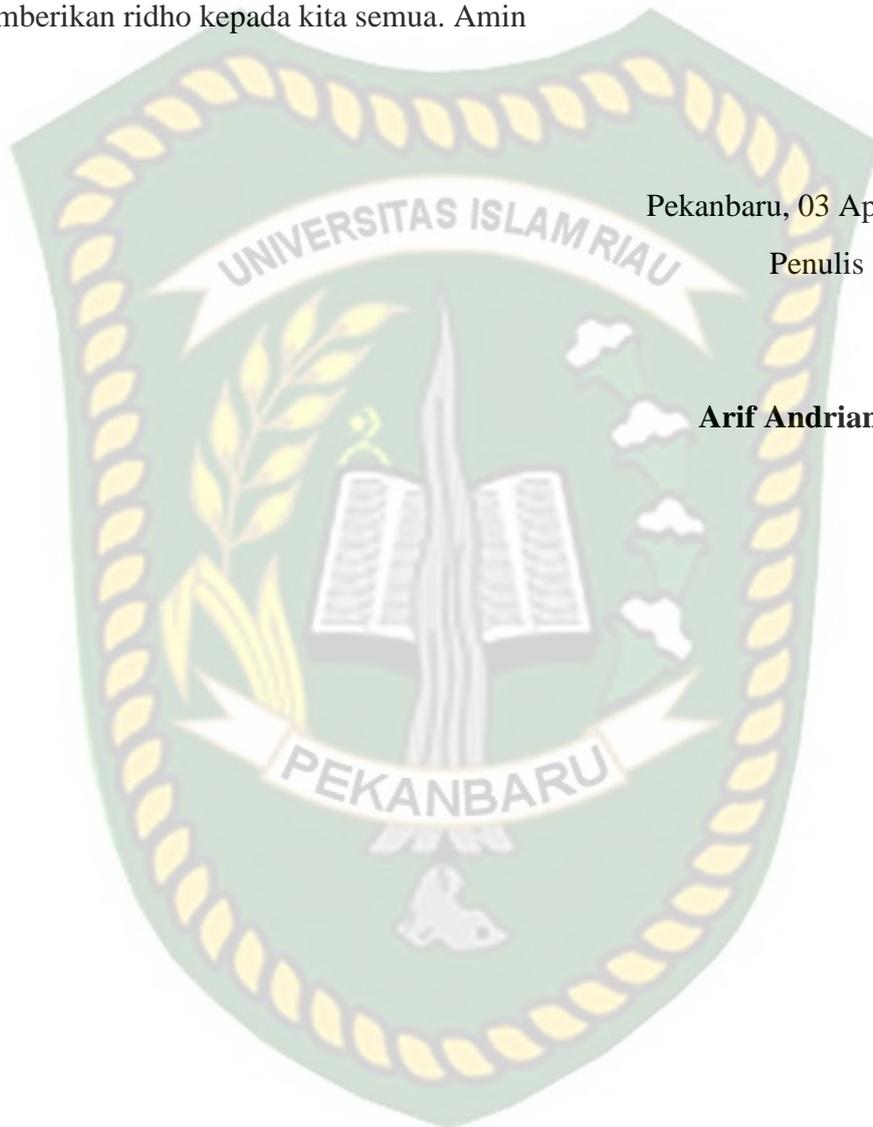
semoga kita sama-sama menemukan masa depan yang sesuai dengan apa yang telah kita perjuangkan.

Akhir kata penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho kepada kita semua. Amin

Pekanbaru, 03 April 2019

Penulis

Arif Andriansyah



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DARTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II : STUDI KELAMIN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	12
B. Kerangka Pikir	27
C. Operasional Variabel dan Operasionalisasi Variabel	27
D. Teknik Pengukuran	32
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Populasi dan Sampel	37
D. Teknik Penarikan Sampel	38
E. Jenis dan Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	39

H. Jadwal Kegiatan Penelitian	39
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	40

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar	43
B. Gambaran Umum Pemerintahan Kecamatan Kampar Kiri Hilir	45
C. Struktur Organisasi Kantor Camat Kecamatan Kampar Kiri Hilir	46
D. Tugas dan Fungsi Kantor Camat Kecamatan Kampar Kiri Hilir	
1. Camat	47
2. Sekretariat Camat	48
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
b. Sub Bagian Keuangan	
3. Seksi Pemerintahan	49
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat	50
5. Seksi Kesejahteraan Sosial	51

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Identitas Responden	54
1. Responden Menurut Jenis Kelamin	54
2. Responden Menurut Tingkat Usia	55
3. Responden Menurut Tingkat Pendidikan	56
B. Hasil dan Pembahasan	57
1. Perencanaan	58
2. Komunikasi	60
3. Pembagian Tugas	63
4. Pengawasan	65

C. Faktor Penghambat Penghambat Peranan Camat Dalam

Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar	69
--	----

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR KEPUSTAKAAN	74
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN	96
-----------------------	-----------



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat pada Undang-Undang dasar alenia keempat yaitu ”kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut tentunya harus dilakukan kerja sama antar instansi pemerintah dalam hal ini eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk melaksanakan segala tugas untuk memenuhi dan melindungi kepentingan bangsa Indonesia dibentuk dengan cara berpartisipasi yang mana di mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Desa dan Kecamatan.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah Kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah Kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah Kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di Kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistic diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, system administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan

dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam pasal 221 ayat 1 mengatakan kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Selanjutnya dalam pasal 224 ayat 1 dikatakan Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yang terdapat dalam pasal 10. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerpan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan peraturan nomor 17 tahun 2018 mengenai kecamatan terlihat salah satu tugas dan fungsi Camat yang terdapat dalam pasal 10 yaitu adalah melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, yang mana Camat sebagai Koordinator dan melakukan koordinasi dalam kegiatan tersebut, untuk lebih jelasnya pasal 10 ayat (1) huruf c peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan. Tugas camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan.
- b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.

Sehingga dapat dipastikan Camat dan pemerintah Kecamatan mempunyai kewajiban dan tugas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan dengan bekerja sama dengan pemerintah kelurahan dan lembaga-lembaga lainnya.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas wilayah 10.983,64 km² dengan jumlah penduduk 10.966 jiwa, membawahi 22 kecamatan dan 250 kelurahan/desa. Jumlah masyarakat dikecamatan Kampar Kiri Hilir yaitu 20.218 jiwa. Kecamatan Kampar Kiri Hilir terdiri dari beberapa desa dan kelurahan yang meliputi Kelurahan Sungai Pagar, Desa Sungai Petai, Desa Sei Simpang Dua, Desa Rantau Kasih, Desa Mentulik, Desa Gading Permai, Desa Bangunsari dan Desa Sungai Bunggo. Jadi Kecamatan Kampar Kiri Hilir terdiri dari 1 Kelurahan dan 7 Desa.

Kecamatan Kampar Kiri Hilir merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar yang memiliki 1 Kelurahan dan 7 Desa. Nama-Nama Desa dan Nama Kepala Desa Dapat Dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.I : Nama Kelurahan/Desa dan Kepala Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2018

No	Keluraha/Desa	Kepala Desa/Lurah
1	Kelurahan Sungai Pagar	Agus Wiyana
2	Desa Sungai Petai	Azwar
3	Desa Sei Simpang Dua	Solihin
4	Desa Rantau Kasih	Radison

1	2	3
5	Desa Mentulik	Afrizal Zein
6	Desa Banggun Sari	Harmonis
7	Desa Gading Permai	Ali Murin
8	Desa Sungai Bunggo	Marzai

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Kampar Kiri Hilir Tahun 2018

Koordinasi yang dilakukan Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan dengan melakukan beberapa cara yaitu koordinasi baik vertikal maupun secara horizontal:

1. Koordinasi vertikal berupa koordinasi antara Camat, pegawai Kecamatan yang meliputi:
 - a. Rapat koordinasi
 - b. Melaporkan segala kebijakan yang diputuskan
 - c. Menyampaikan secara berkala laporan tertulis kepada pimpinan atau kepala wilayah (Camat)
 - d. Mensosialisasikan tujuan kepada para anggota
 - e. Atasan atau pimpinan harus sering melakukan komunikasi informasi dengan para bawahan.
2. Koordinasi horizontal berupa koordinasi antara Camat terhadap Kepala Kepolisian, Korem maupun Satpol PP yang meliputi:
 - a. koordinasi antara lembaga

- b. Konsultasi antara kepala instansi atau lembaga
- c. Mensosialisasikan tujuan kegiatan dan proyek
- d. Melakukan pemantauan dan pengawasan secara bersama
- e. Anantara lelabaga saling memberikan informasi

Berikut dijelaskan beberapa kejadian ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi selama tahun 2015 sampai dengan 2017 yaitu:

Tabel 1.2 Jumlah Gangguan di Bidang Ketentraman di Kecamatan Kampar Kiri Hilir

No	Masalah Ketentraman	Jumlah Kasus
1	Balapan Liar	2
2	Perjudian	4
3	Perkelahian Warga	2
4	Kemalingan/Pencurian (motor,buah sawit)	6

Sumber : Kantor Camat dan Kapolsek Kecamatan Kampar Kiri Hilir

Tabel 1.3 Jumlah Kasus Gangguan di Bidang Ketertiban di Kecamatan Kampar Kiri Hilir

No	Masalah Ketertiban	Jumlah Kasus
1	Penertipan Pasar	6
2	Penertipan Lahan Parkir	6

Sumber : Kantor Camat dan Kapolsek Kecamatan Kampar Kiri Hilir

Apabila diamati secara lebih mendalam dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan menggambarkan bahwa tugas umum yang

dilaksanakan oleh Camat belum berjalan dengan Maksimal. Hal ini yang dilihat dari fenomena yang penulis temukan dilapangan. Dari kasus-kasus diatas penulis dapat mengidentifikasi dan mengelompokan menjadi dua fenomena yaitu:

1. Fenomena Ketentraman

Dari data diatas dapat kita lihat jumlah kasus ketentraman yang ada dikecamatan Kampar Kiri Hilir, yaitu:

- a. Masih terjadinya kasus pencurian yang meresahkan warga masyarakat yang berada di beberapa desa dikecamatan Kampar kiri hilir, hal ini terjadi dikarenakan tidak aktifnya pos ronda malam yang dilakukan oleh msyarakat. Camat sebagai kepala wilayah seharusnya berkoordinasi berupa himbauan Kepada Kepala Desa, Lurah yan ada di Kecamatan Kampar Kiri Hilir untuk mengaktif kembali kegiatan ronda malam.
- b. Kurang efektifnya tindakan pencegahan maupun pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Kampar Kiri Hilir dengan Kapolsek, Kepala Desa/Lurah beserta Masyarakat dan Pemuka Agama setempat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir , ini ditandai dengan sering terjadinya perjudian.
- c. Masih adanya balapan liar yang dilakukan dimalam hari yang membuat masyarakat yang tidur merasa terganggu dikarenakan suara sepeda motornya keras.
- d. Kemudian penulisjuga melihat sering kali warga yang mempunyai hajatn atau mengadakan acara tertentu pada malam hari sering melewati batas

waktu yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan dampak kebisingan yang mengganggu warga sekitar lingkungan tersebut akibat suara music. Selain itu dampak yang ditimbulkan juga akibat dari diadakan acara tersebut yaitu perkelhian antar sesama warga, karena kebanyakan dari mereka meminum air beralkohol.

2. Fenomena Ketertiban

Dari data diatas dapat kita lihat jumlah kasus ketertiban yang ada dikecamatan Kampar Kiri Hilir, yaitu:

- a. Kasus penertipan pedagang pasar, terjadinya di kecamatan Kampar kiri hilir tepatnya di Kelurahan Sungai Pagar. Pelanggaran yang terjadi yaitu banyaknya pedagang pasar yang berjualan secara tidak teratur ditambah lagi lokasi pasar tidak terlalu besar. Terkait kasus ini seharusnya Camat berkoordinasi dengan Lurah setempat mengenai permasalahan yang terjadi dilingkungan pasar, untuk menciptakan pasar yang tertib, aman dan kondusif.
- b. Masih banyaknya masyarakat yang pergi kepasar memarkirkan kendaraan motor nya tidak sesuai denga aturan. Hal ini berakibatkan sulitnya pemilik kendaraan bermotor mengeluarkan sepeda motornya dikarenakan parkiran yang menumpuk/tidak sesuai aturan.

Dari fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir.

B. Perumusan Masalah

Keberhasilan seseorang pemimpin maupun bawahan dalam menjalankan tugas dan wewenang organisasinya sebagaimana telah ditetapkan, tidak terlepas dari adanya kerjasama atau koordinasi antara para anggota organisasi itu sendiri dalam memberikan dukungan dan bantuan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan organisasi seperti pada instansi kecamatan Kamar Kiri Hilir Kabupaten Kamar.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat membuat suatu batasan masalah agar tidak terjadinya kesalah pahaman dalam penafsiran dan permasalahan di luar konteks judul. Adapun permasalahan yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimanakah Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kamar Kiri Hilir Kabupaten Kamar?”.

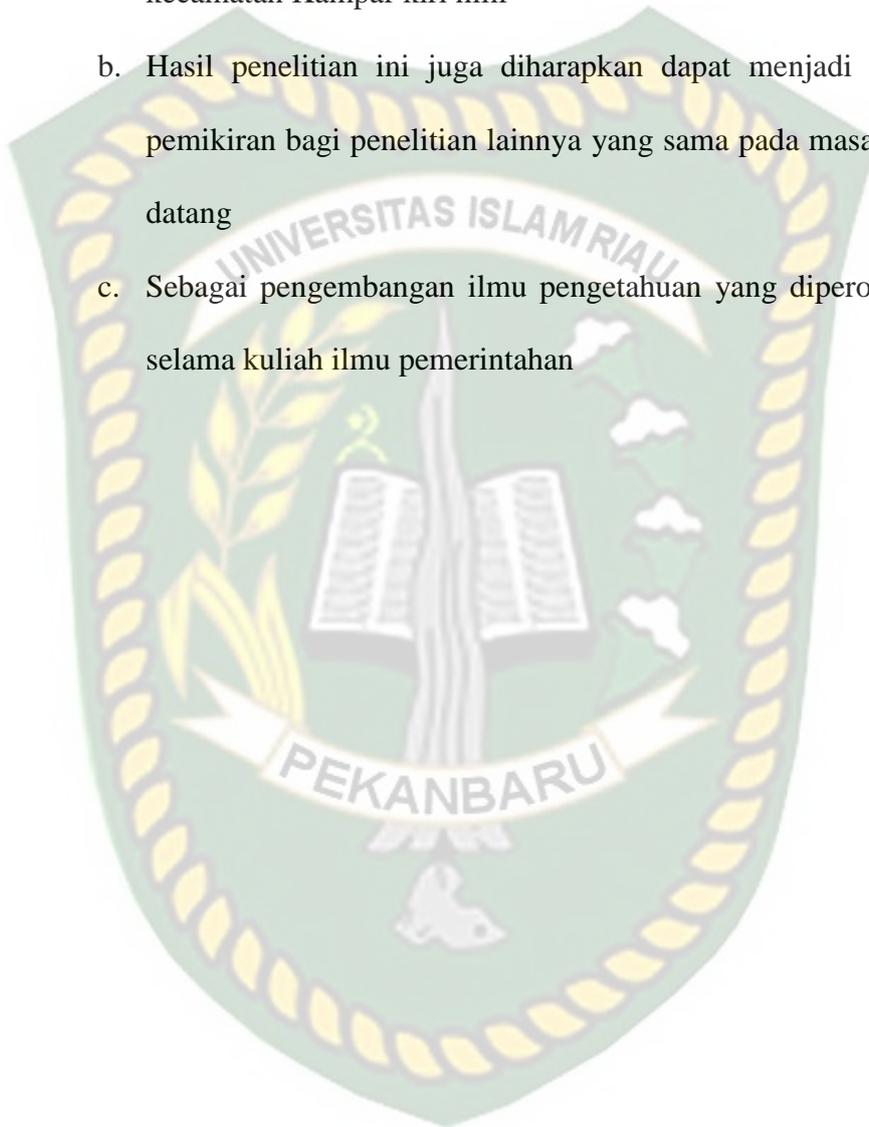
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan camat dalam mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan Kamar kiri hilir
- b. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang terjadi dalam koordinasi camat dalam upaya penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umu di kecamatan Kamar kiri hilir

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi bagi camat untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan pengkoordinasian di kecamatan Kampar kiri hilir
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penelitian lainnya yang sama pada masa yang akan datang
- c. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama kuliah ilmu pemerintahan



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepuskaan

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu organisasi yang tersusun dari segenap komponen bangsa yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, melalui fungsi yang dijalankan yaitu pelayanan kepada masyarakat (service), membuat pedoman/arah atau ketentuan kepada masyarakat (regulation) dan pemberdayaan (empowerment).

Menurut Rosental (dalam skripsi Nanang Deswanto 2014:12) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengeluti tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Kemudian menurut poeljo (dalam skripsi Nanang Deswanto 2014:12) dalam buku Pengantar Ilmu Pemerintahan mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Menurut Muhammad Yamin (dalam syafiie, 2005:75) pemerintah adalah jabatan atau aparatur dalam susunan poli itik sedangkan pemerintahan stiadalah tugas kewajiban alat Negara. Untuk mengindarkan keraguan-lakeraguanh pemerintahan dan pemerintah maka dapat rincian “pemerintah menunjuk kepada nya ,sedangkan “pemerintahan”menunjuk kepada fungsi,tugas dan wewenangnyanya.

Menurut Ndraha (dalam skripsi Nanang Deswanto 2014:13) Pemerintahan adalah suatu badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud Pemerintahan adalah suatu proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Memahami Pemerintahan dalam konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara struktur Pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan yaitu bahwa Pemerintah di satu sisi berkewajiban mentaati dan mengikuti Pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Menurut Nuscholis (2005: 178-179) Pemerintahan baik pusat maupun Daerah mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

1. Memberikan layanan/service baik pelayanan perorangan maupun pelayanan public.
2. Melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Memberikan perlindungan protektif terhadap masyarakat.

2. Konsep Peranan

Menurut Soekanto (2001:268) Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan, perbedaan antar kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan

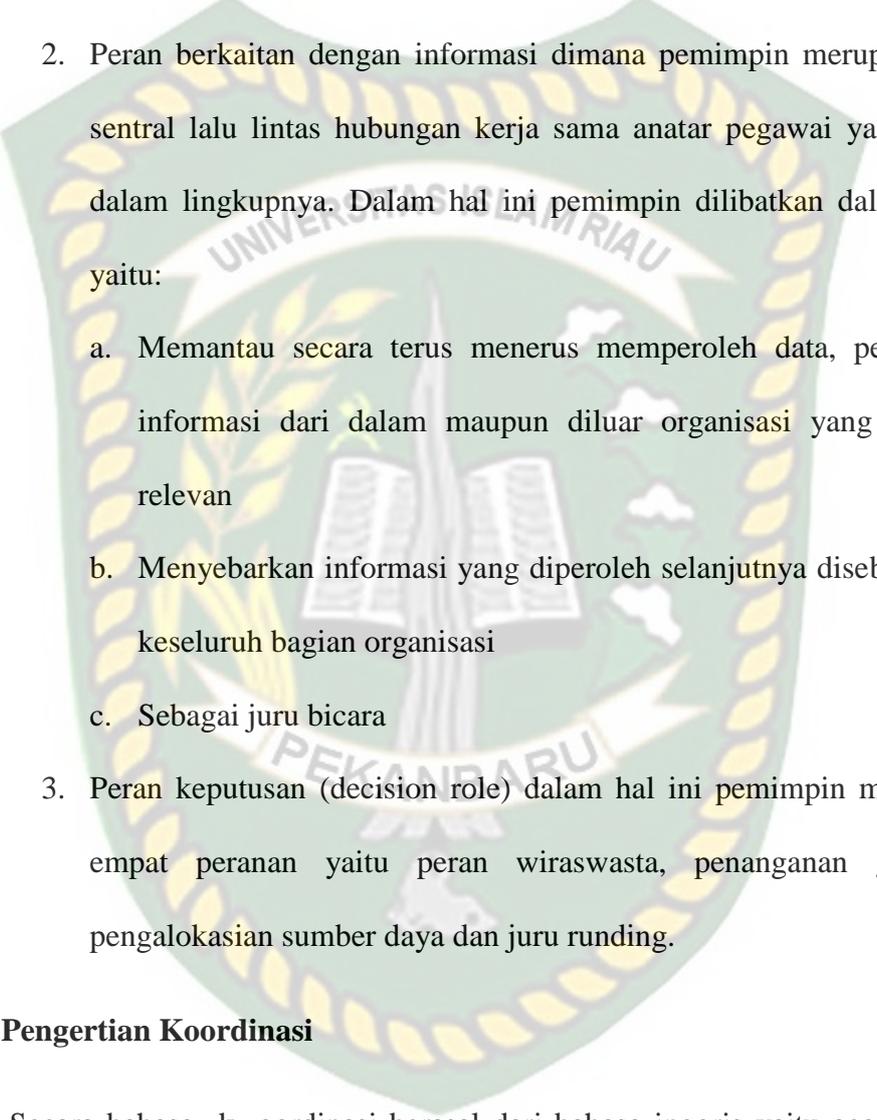
susanto menjelaskan peranan adalah dinamisasi dari status dan penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bias disebut status objektif, dengan adanya prestise dan derajat social maka terbentuk pula apa yang dikenal status dan peranan.

Menurut Ndraha (2005:53) peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan atau ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa peranan adalah kewajiban yang dimiliki oleh suatu individu atau organisasi dan diharuskan melakukan segala sesuatu mengenai tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Stogdil (dalam Giroth, 2004:25) mengatakan memandang konsep peranan sebagai pemikiran tentang yang dirarapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sipat-sipat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajiban , karena jabatan atau pekerjaannya. Dalam peran yang berhubungan dengan pekerjaannya. Menurut kusnadi (2005:358) ada tiga peran yang dilakukan pimpinan dalam organisasi yaitu:

1. Peran pribadi, mengacu pada hubungan antara pimpinan dengan yang lain baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini pemimpin memiliki peran berbeda yaitu:
 - a. Figuran bertindak sebagai symbol organisasi

- 
- b. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif dan efisien dan mempengaruhi mereka bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan
 - c. Peran perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai
 2. Peran berkaitan dengan informasi dimana pemimpin merupakan unit sentral lalu lintas hubungan kerja sama antar pegawai yang berada dalam lingkungannya. Dalam hal ini pemimpin dilibatkan dalam 3 hal, yaitu:
 - a. Memantau secara terus menerus memperoleh data, persen atau informasi dari dalam maupun diluar organisasi yang dianggap relevan
 - b. Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan keseluruhan bagian organisasi
 - c. Sebagai juru bicara
 3. Peran keputusan (decision role) dalam hal ini pemimpin memainkan empat peranan yaitu peran wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding.

3. Pengertian Koordinasi

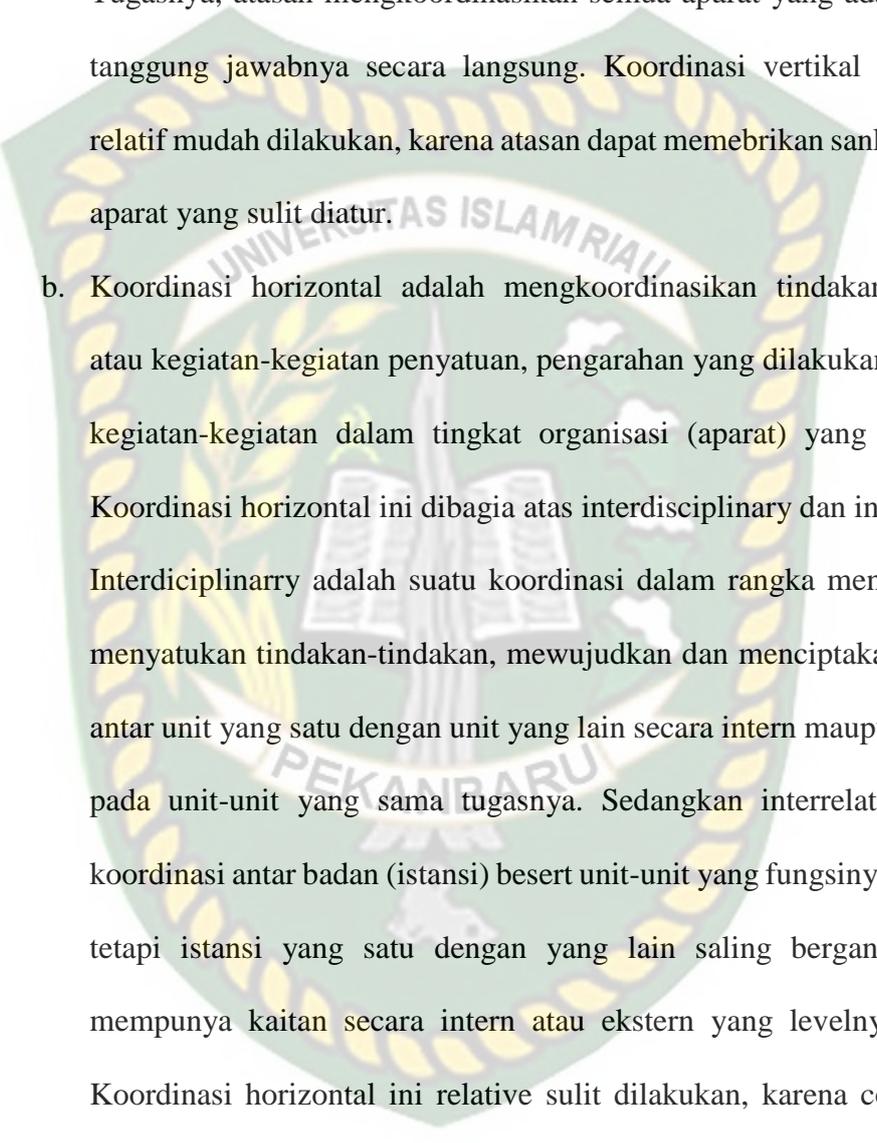
Secara bahasa k- oordinasi berasal dari bahasa inggris yaitu acoordination yang merupakan dasar dari kata con ordinate yang berarti to regulate. Secara empirik koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama hal tertentu yang ingin dicapai.

Koordinasi Pemerintahan adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antara pemerintah dan yang diperintah sehingga disatu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintah yang telah ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh pihak yang lain.(Ndraha, 2003:293)

Menurut Hasibuan (2003:85) koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi secara optimal, maka pihak pemerintahan dan pembangunan yang diselenggarakannya.

Menurut G.R Terry (dalam Hasibuan 2006:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Daryanto dan Abdullah (2013:50) koordinasi adalah proses menyatukan, mengkomunikasikan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa tipe koordinasi dibagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi. Makna kedua tipe koordinasi ini dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

- 
- a. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya, atasan mengkoordinasikan semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.
- b. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagias atas interdisciplinary dan interrelated. Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antar unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Sedangkan interrelated adalah koordinasi antar badan (istansi) besert unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relative sulit dilakukan, karena coordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

Cara melakukan koordinasi Menurut Hasibuan (2006:88) meliputi:

1. Memerikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saya tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik(informasi)
2. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama.(pengarahan)
3. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, menukarkan ide, saran-saran dan lain sebagainya.
4. Mendorong para anggota untuk berspartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran.(partisipasi)
5. Membina human relation yang baik antara sesama karyawan.(human relationa)
6. Menejer sering melakukan komunikasi informasi dengan para bawahan.(Komunikasi)

Ringkasannya suatu koordinasi akan lebih baik, jika memperoleh dukungan partisipasi dari bawahan dan pihak-pihak yang terkait yang akan melakukan pekerjaan diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan, supaya mereka antusias dalam melaksanakannya.

Menurut Nurcholis agar koordinasi bisa berjalan dengan baik maka perlu:

- a. Adanya kesesuaian antara kebijakan dasar dan keputusan pelaksanaannya
- b. Adanya perlakuan yang sama terhadap semua aktor yang terlibat
- c. Adanya perilaku yang konsisten antara para pejabat dalam menyelenggarakan tugasnya sesuai dengan deskripsi tugas masing-masing
- d. Adanya tindakan para pejabat yang taat azaz terhadap prosedur dan batas waktu yang ditentukan
- e. Adanya kejelasan kebijakan itu sendiri dan cara melaksanakannya. (Nurcholis, 2007:271).

Melihat berbagai sudut pandang dan pengertian tentang koordinasi diatas, maka menurut peneliti dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) hal yang ada dari sebuah kegiatan yang dinamakan koordinasi, baik dalam struktur maupun dalam struktur organisasi Pemerintahan, Yaitu:

- a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan dari pembuat keputusan berdasarkan sumber data yang tersedia dan disusun secara sistematis.

- b. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam usaha untuk berhubungan baik yang dilakukan organisasi maupun antar instansi yang dilakukan secara sadar baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Pembagian Tugas

Pembagian Tugas adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam membagi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar hasil dari tugas itu sesuai dengan yang diharapkan, serta membagi program-program sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kendala yang dihadapi dan bagaimana penyelesaiannya. (Stoner, 1991, Manajemen).

4 . Cara Melakukan Koordinasi

Koordinasi dapat dilakukan secara formal maupun informal, melalui konferensi lengkap, pertemuan berkala, pemebentukan panitia gabungan, pembentukan badan koordinasi staf, wawancara dengan bawahan, memorandum berantai, buku pedoman lembaga, tata kerja dan sebagainya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat sutarto (dalam mulyasa, 2002:137) yang mengemukakan cara-cara kordinasi sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan informal di antara para pejabat
2. Mengadakan pertemuan formal di antara para pejabat
3. Membuat edaran berantai kepada para pejabat yang diperlukan
4. Membuat penyebaran kartu kepada para pejabat yang diperlukan
5. Mengangkat coordinator

6. Membuat buku pedoman lembaga, buku pedoman tata kerja dan buku pedoman kumpulan peraturan
7. Membuat tanda-tanda
8. Membuat symbol
9. Membuat kode
10. Berhubungan dengan alah penghubung(telepon)
11. Bernyanyi bersama

Pada hakikatnya, koordinasi dapat dilakukan secara formal dan informal. Koordinasi formal dapat diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya impersonal, seperti dalam kehidupan birokrasi, membuat peraturan dan pedoman, mengangkat pejabat atau panitia bersama dan dokumen resmi lainnya. Sementara cara-cara informal dapat dilakukan dengan pembicaraan dan konsultasi pada saat bertemu diluar kepentingan dinas.

Dalam koordinasi, setiap unit lembaga mengadakan hubungan untuk saling tukar pikiran mengenai kegiatan dan hasil yang telah dicapai pada saat tertentu, serta saling mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi dan mencari jalan pemecahannya, sekaligus membantu memecahkan masalah. Dengan demikian, setiap pekerjaan dapat dikerjakan dengan lancar dan terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

5 . Teori Manajemen dan Manajemen Pemerintahan

Mary Parker Follet (dalam Stoner, 1992:6) mengatakan bahwa manajemen adalah seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang-orang.

Artinya manajer dalam usahanya mencapai tujuan organisasi dilakukan dengan cara mengatur, memerintah, memimpin dan mendalikan orang lain untuk menjalankan tugas-tugas apapun yang perlu, bukan dengan menjalankan sendiri tugas-tugas tersebut.

Stoner, freeman, Gilbert (1996:7) mengatakan manajemen adalah proses merencanakan, menggorganisasikan, memimpin dan menegndalikan pekerjaan anggota organisasi dan mengunkan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.

Manajemen merupakan cara bagaimana menciptakan effectiveness usaha secara effisien dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan. (Taliziduhu Ndraha dalam bukunya Kybernologi)

Budi Suprianto (2009:24) manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan "tata kelola" atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Suryadinata (1998) memandang manajemen pemerintahan sebagai suatu kegiatan atau usaha mencapai tujuan Negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh Negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses pengerakan untuk mencapai tujuan Negara, dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepamongprajaan.

Rasyid (2000:148) manajemen pemerintahan adalah manajemen yang diarahkan agar terlebih dahulu merumuskan hasil apa atau dengan kata lain tujuan apa yang dicapai dengan uang, peralatan, keahlian dan tenaga kerja yang kemudian dilaksanakan. Selanjutnya hasil akan di evaluasi untuk menentukan apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Manajemen pemerintah juga menganut prinsip-prinsip seperti manajemen pada umumnya yaitu efisiensi, efektifitas dan inovasi dalam proses menghimpun dan mengerakan orang-orang, memperoleh dan menggunakan uang, serta mengadakan, mempergunakan dan memelihara peralatan demi tercapainya tujuan organisasi.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, dalam hubungan kedalam, manajemen pemerintahan bertanggung jawab mengembangkan kemampuan staf yang serba bisa, membangun hubungan kerja vertikal dan horizontal yang saling mendukung, serta menciptakan suasana kerja yang bergairah. Sehingga kreatifitas setiap aparat dapat dipacu dan pada gilirannya menjamin berlangsungnya inovasi yang terus menerus. Dalam hubungan keluar, manajemen pemerintahan bertanggung jawab membina kemampuan dan disiplin seluruh aparat untuk menyelenggarakan tugas pokok pemerintahan yaitu:

1. Pelayanan (service) yang membuahkan keadilan dalam masyarakat
2. Pemberdayaan (empowerment) yang akan mendorong kemandirian masyarakat
3. Pemabngunan (development) yang akan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

6. Teori Ketentraman dan Ketertiban

“Tentram” ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram , artinya keamanan , ketenangan(pikiran). Selanjutnya tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib aturan dalam siding

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, masyarakat sebagai satu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.(UU No 2, 2002 pasal 1)

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah kecamatan beserta jajarannya melaksanakan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan wilayahnya masing-masing. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga system

ketertiban dan menciptakan ketentraman, dimana masyarakat menjalani kehidupan dengan wajar.

Madjloes (dalam syahyahrudin, Ilmu Pemerintahan, 2009;26) Ketentraman dan Ketertiban adalah dua keadaan yang sangat dirasakan bersama dalam situasi waktu. Ketentraman sebagai suatu keadaan akibat dari pada adanya ketertiban, tanpa adanya terlebih dahulu ketertiban orang akan sia-sia mengharapkan adanya keamanan. Apabila ketertiban telah berjalan dengan baik sebagai mana diharapkan maka dengan sendirinya akan dirasakan adanya ketentraman

Ketertiban salah satu syarat utama dalam mensukseskan pembangunan ketertiban. Menurut Madjloes (dalam Rauf, 2005:6) adalah sebagai suatu asas tata kehidupan dan hasil-hasil dari ketentuan, baik secara tertulis yang disepakati dan dilaksanakan bersama.

Ciri – Ciri pokok ketertiban menurut Soekanto (2001:78) adalah:

1. Dapat diproyeksikan sebelumnya
2. Kerjasama
3. Pengendalian terhadap kekerasan
4. Konsistensi
5. Tahan lama
6. Stabilitas
7. Hierarki
8. Konformitas

9. Tidak adanya konflik
10. Uniformitas atau keseragaman
11. Gotong-royong
12. Berdasarkan kepada kepatuhan
13. Berpegang pada tahap yang telah ditentukan
14. Sesuai dengan pola
15. Tersusun

Definisi diatas menunjukan bahwa ketentraman dan ketertiban itu menunjukan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pemabngunan.

Jadi dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

B. Kerangka Pikiran

Gambar II.I kerangka pikir Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar



Data Olahan Penelitian Tahun 2018

C. Operasional Variabel dan Operasionalisasi Variabel

Operasional dari penelitian ini adalah untuk memperjelas tujuan penelitian tentang pelaksanaan tugas umum pemerintahan tentang fungsi koordinasi camat di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

Beberapa konsep-konsep penelitian yang akan di operasionalkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kecamatan adalah pembagian administratif di Indonesia dibawah Kabupaten/Kota. Dikecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan.
2. Camat merupakan pemimpin kecamatan serta Camat berkedudukan di wilayah kecamatan.
3. Peranan (role) merupakan suatu usaha atau kemampuan dari orang-orang yang menduduki jabatan untuk dapat mengerakan serta menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat dalam mencapai suatu tujuan.
4. Peranan camat sebagai koordiantor penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan kampar kiri hilir kabupaten Kampar.
5. Koordinasi adalah kegiatan menganalisa dalam berbagai kegiatan sebagai usaha mencapai tujuan organisasi.
6. Pelaksanaan koordinasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya menyamakan pandangan yang meliputi kegiatan perencanaan, komunikasi, pembagian tugas dan pengawasan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
7. ketentraman dan ketertiban dalah suatu kondisi aman, tentram, damai dan tidak ada gangguan dari manapun yang berjalan secara teratur.
8. Koordinasi dalam perencanaan, yang dimaksud perencanaan adalah suatu kegiatan untuk menjalankan apa-apa saja yang akan dikerjakan dalam

rangka pencapaian tujuan organisasi yang dikerjakan oleh Camat. adapun yang menjadi item penilaian ini yaitu:

- a. Adanya rumusan tujuan yang akan dilaksanakan
 - b. Adanya penempatan waktu dalam pencapaian
 - c. Adanya standar dalam melaksanakan program kerja
9. Koordinasi dalam komunikasi, yang dimaksud komunikasi adalah adanya komunikasi dan informasi yang dibangun oleh pimpinan organisasi yaitu camat dengan berbagai bagian yang terkait dalam melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sehingga masing-masing bagian organisasi tersebut mengerti apa-apa saja tugas yang mesti dilakukannya. Adapun yang menjadi item penilaian ini yaitu:
- a. Jelasnya pemberian perintah
 - b. Jelasnya pesan-pesan yang disampaikan
 - c. Dapatnya pesan yang dijalankan
10. Koordinasi dalam pembagian tugas, yang dimaksud pembagian tugas adalah penentuan tugas oleh pimpinan organisasi yaitu Camat terhadap masing-masing bagian atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi penilaian dalam penelitian ini yaitu:
- a. Adanya perincian tugas masing-masing instansi terkait
 - b. Adanya pembagian wewenang
 - c. Adanya garis komando
11. Koordinasi dalam pengawasan, yang dimaksud pengawasan adalah usaha-usaha yang dilakukan pimpinan organisasi yaitu camat dalam menjaga apa

rencana-rencana dan pembagian kerja yang telah diberikan pada masing-masing instansi agar tidak menyimpang pada tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun yang menjadi penilaian dalam penelitian ini yaitu:

- a. Dilakukan pemantauan terhadap rencana yang telah ditetapkan
- b. Adanya perbaikan atas kesalahan yang dilaporkan
- c. Adanya pengawasan langsung kelapangan

Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi konsep-konsep penilaian dan pengukuran indicator variable dari penilaian ini maka dapat penulis gambarkan melalui tabel operasional variable dalam tabel II.I berikut ini:



Tabel II.I Operasionalisasi Variabel Penelitian Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

Konsep	Variabel/ Dimensi	Indikator	Item yang Dinilai	Skala
1	2	3	4	5
koordinasi pemerintahan adalah kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur(yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antara pemerintah dan yang diperintah sehingga disatu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintah yang telah ditetapkan bersama dan disisilain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh pihak yang lain.(Ndraha:293)	Peranan Camat Dalam Maengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar	1.Perencanaan 2.Komunikasi 3.Pembagian Tugas	1.adanya rumusan tujuan yang akan dilaksanakan 2.adanya penempatan waktu dalam pencapaian tujuan 3.adanya standar dalam melaksanakan program kerja 1.jelasnya pemberian perintah 2.jelasnya pesan yang di sampaikan 3. dapatnya pesan dijelaskan 1.adanya perincian tugas dari masing-masing instansi 2.adanya pembagian wewenajng dan tanggung jawab 3.adanya garis komando	-Berperan -Cukup Berperan -Kurang Berperan -Berperan -Cukup Berperan -Kurang Berperan -Berperan -Cukup Berperan -Kurang Berperan

1	2	3	4	5
		4.Pengawasan	1.dilakukan pemantauan terhadap rencana yang telah ditetapkan 2.adanya perbaikan atas kesalahan yang dilaporkan 3.adanya pengawasan langsung ke lapangan	-Berperan -Cukup Berperan -Kurang Berperan

Data Olahan Penelitian Tahun 2018

D.Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap pelaksanaan Variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu Berperan, Cukup Berperan dan Kurang Berperan. Untuk memudahkan dalam melakukan analisis data, uraian dari masing-masing pengukuran di atas dari variable Peranan Camat Dalam mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dapat dinilai sebagai berikut :

Berperan : apabila seluruh indikator variable berada

pada Kategori berperan atau jawaban responden berada pada skor 67%-100%

Cukup Berperan : apabila dua dari tiga indikator variable berada Pada kategori cukup berperan atau jawaban responden berada pada skor 34%-66%

Kurang Berperan : apabila hanya satu atau tidak satupun dari indikator variable berada pada kategori kurang berperan atau jawaban responden berada pada skor <33%

Sedangkan untuk pengukuran masing-masing indikator dalam Pelaksanaan Koordinasi Dalam Ketentraman dan Ketertiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan indikator Variabel Koordnasi dalam Perencanaan, dikategorikan :

Berperan : apabila akumulasi dari persentase pelaksanaan indikator, variable koordinasi terlaksana antara 67%-100%

Cukup Berperan : apabila akumulasi dari persentase pelaksanaan indikator variable koordinasi terlaksana antara 34%-66%

Kurang Berperan : apabila akumulasi dari pesentase pelaksanaan indikator variable koordinasi terlaksana antara 0%-33%

2. Pelaksanaan Indikator Variabel Koordinasi dalam Komunikasi,
dikategorikan :

Berperan : apabila akumulasi dari persentase pelaksanaan
indikator variabel koordinasi terlaksana antara
67%-100%

Cukup Berperan : apabila akumulasi dari persentase pelaksanaan
indikator variabel koordinasi terlaksana antara
34%-66%

Kurang Berperan : apabila akumulasi dari persentase pelaksanaan
indikator variabel koordinasi terlaksana antara
0%-33%

3. Pelaksanaan Indikator Variabel Koordinasi dalam Pembagian Tugas,
dikategorikan :

Berperan : apabila akumulasi dari persentase pelaksanaan
indikator variabel koordinasi terlaksana antara
67%-100%

Cukup Berperan : apabila akumulasi dari persentase pelaksanaan
indikator variabel koordinasi terlaksana antara
34%-66%

Kurang Berperan : apabila akumulasi dari persentase pelaksanaan

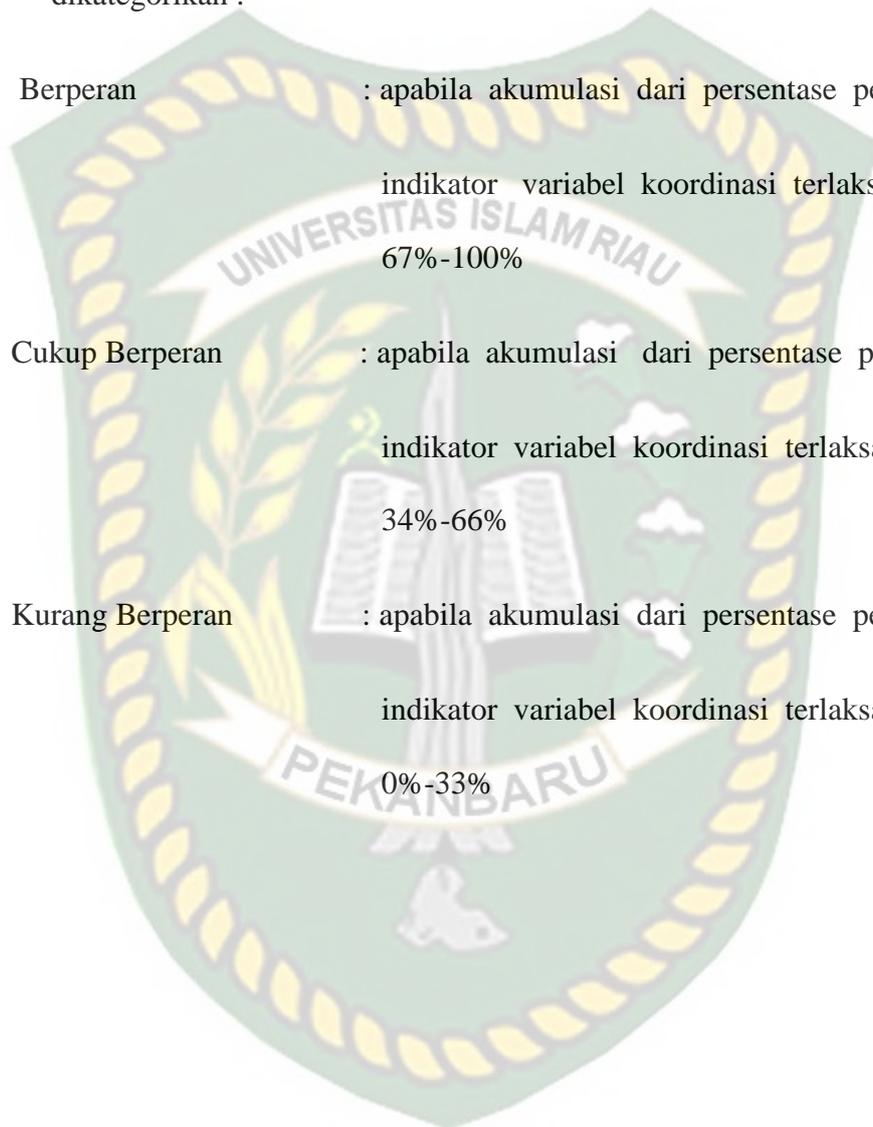
indikator variabel koordinasi terlaksana antara
0%-33%

4. Pelaksanaan Indikator Variabel Koordinasi dalam Pengawasan,
dikategorikan :

Berperan : apabila akumulasi dari persentase pelaksanaan
indikator variabel koordinasi terlaksana antara
67%-100%

Cukup Berperan : apabila akumulasi dari persentase pelaksanaan
indikator variabel koordinasi terlaksana antara
34%-66%

Kurang Berperan : apabila akumulasi dari persentase pelaksanaan
indikator variabel koordinasi terlaksana antara
0%-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah survey deskriptif, dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan masalah dalam Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

Pengunaan metode ini mengukur secara cermat mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dengan menggunakan analisis Kuantitatif melalui penggambaran sistematis dan menggunakan fakta-fakta yang ada, survey dibatasi pada penelitian yang datanya terkumpul dari sampel yang mewakili populasi.

B. Lokasi Penelitian

Melihat Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, adapun pertimbangan menetapkan lokasi penelitian ini adalah karna ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Kampar Kiri Hilir berdasarkan fakta, dijumpai persoalan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ini ditandai adanya perjudian dimalam hari, pencurian sepeda motor yang meresahkan masyarakat, aksi kebut-kebutan dimalam hari yang mengganggu warga masyarakat yang sedang tidur,

masih kurang tertib nya pedagang saat berjualan dipasar dan kurang efektifnya petugas dalam mengatur tempat parkir sepeda motor. Adapun alasan lain menetapkan lokasi penelitian di Kecamatan Kampar Kiri Hilir adalah kemudahan jarak tempuh saat melakukan penelitian tersebut.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan suatu objek yang menjadi perhatian penelitian. Adapun jumlah sub populasi dalam penelitian ini adalah Camat, Sekretaris Camat, Kapolsek, Kepala Desa, Lurah, Tokoh Adat dan Jumlah KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.I : Jumlah Populasi dan Sampel Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan ketertiban Umum Di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Camat Kampar Kiri Hilir	1	1	100%
2	Sekretaris Camat	1	1	100%
3	Kapolsek Kampar Kiri Hilir	1	1	100%
4	Kepala Desa	7	3	42,85%
5	Lurah	1	1	100%
6	Tokoh Adat	5	3	60%
7	Jumlah KK	11.051	60	1,84%
	Jumlah	11.067	70	1,55%

Data Olahan Penelitian Tahun 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik yaitu sensus atau pengambilan sampel jenuh yang meliputi Camat Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan Kapolsek dan Purposive Sampling yang meliputi Lurah, Kepala Desa, Tokoh lembaga Adat dan Jumlah KK.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari responden penelitian untuk memperoleh jawaban yang relevan dari permasalahan penelitian. Data tersebut terdiri dari hasil wawancara, kuisisioner dan observasi yang berupa tanggapan responden peneliti mengenai pelaksanaan koordinasi dalam Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi, laporan-laporan, peraturan-peraturan dan buku-buku yang menjadi sumber-sumber yang dapat menunjang objek penelitian ini:

F. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi Adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian dilapangan terkait dengan

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

2. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada responden mengenai segala sesuatu yang menyangkut masalah penelitian yang bertujuan mendapatkan data yang tercakup dalam angket.
3. Kuisisioner yaitu mengajukan daftar pertanyaan tertulis dilengkapi alternatif jawaban kepada responden yang telah ditetapkan dengan alasan untuk memperoleh data dari responden yang menjadi objek penelitian.
4. Dokumentasi yaitu pengumpulan data antara lain dari buku-buku, perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan lainnya.

G. Teknik Analisa Data

Setelah data yang dipergunakan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut klasifikasi dari jenis dan bentuk, kemudian dilakukan perhitungan dengan memakai tabel frekuensi, tabel persentase dan lain sebagainya untuk selanjutnya dibandingkan dengan referensi yang ada.

H. Jadwal Waktu dan Kegiatan Penelitian

Jadwal dan waktu kegiatan penelitian yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian Peranan Camat Dalam mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yang meliputi usulan penelitian, pelaksanaan penelitian hingga menjadi sebuah karya ilmiah memerlukan rencana jadwal dan waktu penelitian yang sistematis. Untuk jelasnya jadwal dan waktu kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.II : Jadwal kegiatan penelitian Tentang Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

no	Keterangan	Bulan/minggu 2018-2019																			
		Juli-agus				Sep-Okt				Nov-Des				Jan-Fed				Mar-Apr			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi kuisisioner																				
5	Rekomendasi survey																				
6	Survay lapangan																				
7	Analisis data																				
8	Penyusunan laporan hasil penelitian (skripsi)																				
9	Konsultasi revisi skripsi																				
10	Ujian konfrensif																				
11	Revisi skripsi																				
12	Pengandaan skripsi																				

Data Penelitian Penulis Tahun 2018

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian ini dibahas dalam 3 bab, dimana pembahsan-pembahasan bab tersebut mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini berisikan penguraian dari pengertian, definisi konsep dan teori-teori yang menyangkut daftar pustaka, kerangka pikir, konsep operasional, konsep operasionalisasi variabel, serta teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berisikan tentang tipe penelitian, lokasi Penelitian, populasi sampel, teknik pengukuran, jenis dan Sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, Jadwal dan waktu kegiatan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas permasalahan yang akan penulis teliti Mengenai Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis tentukan kemudian diberikan saran atas temuan tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DOKUMENTASI



BAB IV

DESKRPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

Wilayah Kabupaten Kampar, Riau terletak pada 0 Lintang Utara; 1 Lintang Selatan dan 101-02-101 56 Bujur Timur. Kabupaten Kampar dibentuk pada tahun 1956 dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 dengan luas +30.569.56 km². Setelah itu keluar Undang-Undang Nomor 1999 Kabupaten Kampar pasca pemekaran dengan luas wilayah +10.983,64 km². Dengan batasan wilayah sebelah Utara dengan kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Kabupaten Kampar dibentuk pada tahun 1956 dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956. Setelah itu keluar Undang-Undang Nomor 1999 Kabupaten Kampar pasca pemekaran. Kecamatan Kampar Kiri Hilir merupakan Kecamatan pemekaran dari Kecamatan induk yakni Kampar Kiri.

Kecamatan Kampar Kiri Hilir memiliki wilayah 432,4 km². Dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Perhentian Raja
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Langam
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar kiri Tengah
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang

Jumlah Desa dan Kelurahan dikecamatan Kampar Kiri Hilir adalah sebanyak 7 Desa dan 1 Kelurahan, Jumlah Penduduk dikecamatan Kampar kiri hilir berjumlah 10966 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1 : Nama Desa/Kelurahan serta Jumlah Penduduk dikecamatan Kampar Kiri Hilir

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		LK	PR	L+P	
1	Kelurahan Sungai Pagar	1744	1822	3566	955
2	Desa Sungai Petai	836	811	1647	406
3	Desa Sei. Simpang Dua	1051	959	2010	509
4	Desa Sungai Bungo	455	327	782	173
5	Desa Rantau Kasih	358	328	686	168
6	Desa Mentulik	430	429	859	225
7	Desa Bangun Sari	561	497	1058	282
8	Desa Gading Permai	195	163	358	190
	Jumlah	5630	5336	10966	2908
		Orang	Orang	Orang	Orang

Sumber : Data Kecamatan Kampar Kiri Hilir Tahun 2017

Dari tabel diatas, dapat dilihat jumlah Desa dikecamatan Kampar Kiri Hilir serta jumlah penduduk disetiap Desa dan Kelurahan. Adapun jumlah Desa sebanyak 7 Desa dan Kelurahan sebanyak 1 Kelurahan. Jumlah penduduk laki-laki di 7 Desa dan 1 Kelurahan yaitu 5630 orang dan penduduk perempuan di 7 Desa dan 1 Kelurahan yaitu 5336 orang. Total keseluruhan penduduk Kecamatan Kampar Kiri Hilir sebanyak 10966 orang dengan 2908 Kepala Keluarga. Dan secara umum keadaan Topografi Kabupaten Kampar adalah berupa daratan meskipun ada beberapa daerah yang berupa rawa.

B. Gambaran Umum Pemerintahan Kecamatan Kampar Kiri Hilir

Pemerintahan Kecamatan Kampar Kiri Hilir terdiri dari Kantor Camat Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan organisasi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hilir terdiri dari pemerintah yaitu kelurahan, kantor urusan agama (KUA), UPTD Kecamatan, Kesehatan, Kehutanan dan pemerintahan vertikal yang mana secara administrasi berasal dari kementerian pusat seperti Kapolsek dan Koramil.

Sesuai Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan pemerintah Kabupaten Kampar yang mana Camat mempunyai tugas umum pemerintah, meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Adapun visi dan misi Kecamatan Kampar Kiri Hilir ialah terwujudnya Kecamatan Kampar Kiri Hilir yang aman, tentram dan sejahtera, kemudian untuk mencapai visi tersebut adapun misi pendukungnya ialah:

1. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dengan berlandaskan iman dan taqwa
2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat
4. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan infrastruktur yang baik dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

C. Struktur Organisasi Kantor Camat Kecamatan Kamar Kiri Hilir

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan pemerintah Kabupaten Kampar, adapun susunan organisasi Kecamatan meliputi :

1. Camat
2. Sekretariat, yang membawahi
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Kesejahteraan Sosial

D. Tugas Dan Fungsi Kantor Camat Kecamatan Kampar Kiri Hilir

1. Camat

Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari bupati.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
- c. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- e. Pengkoordinasian pembangunan yang meliputi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pemberdayaan masyarakat.
- f. Pengelolaan urusan kesetariatan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan program kegiatan Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan sumber daya yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan.
- c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris Camat

Secretariat Camat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dibidang administrasi, perencanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, urusan umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan teknis administrasi
- b. Perencanaan program kerja kecamatan
- c. Pengkoordinasian tugas administrasi
- d. Pembinaan perangkat kecamatan, kelurahan dan desa

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program kegiatan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian masalah dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan.
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.

- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh kepala seksi lingkungan kecamatan baik langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.

Sekkraris membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub bagian Keuangan

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum Camat dalam bidang pemerintahan umum. Meliputi pembinaan administrasi desa/kelurahan, melaksanakan admnistrasi kependudukan dan catatan sipil pembinaan kehidupan politik dalam negeri.

Seksi pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan seksi pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Menyelenggarakan fasilitas pemilihan kepala desa dan badan perwakilan desa
- c. Menyelenggarakan lomba atau penilaian desa/kelurahan tingkat keamanan
- d. Menyelenggarakan fasilitas kerjasama antar desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan
- e. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan dan penyusunan peraturan desa

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi pemberdayaan masyarakat yang mempunyai tugas membantu camat dalam melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ditingkat Kecamatan. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan kelurahan serta seluruh sub-bagian dan Seksi dilingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- c. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ditingkat Kecamatan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Menyiapkan data di bidang pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan atasan.
- e. Menyusun konsep petunjuk teknis melalui pengkajian sebagai bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan.
- f. Menyiapkan bahan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan guna meningkatkan pelayanan di tingkat Kecamatan.

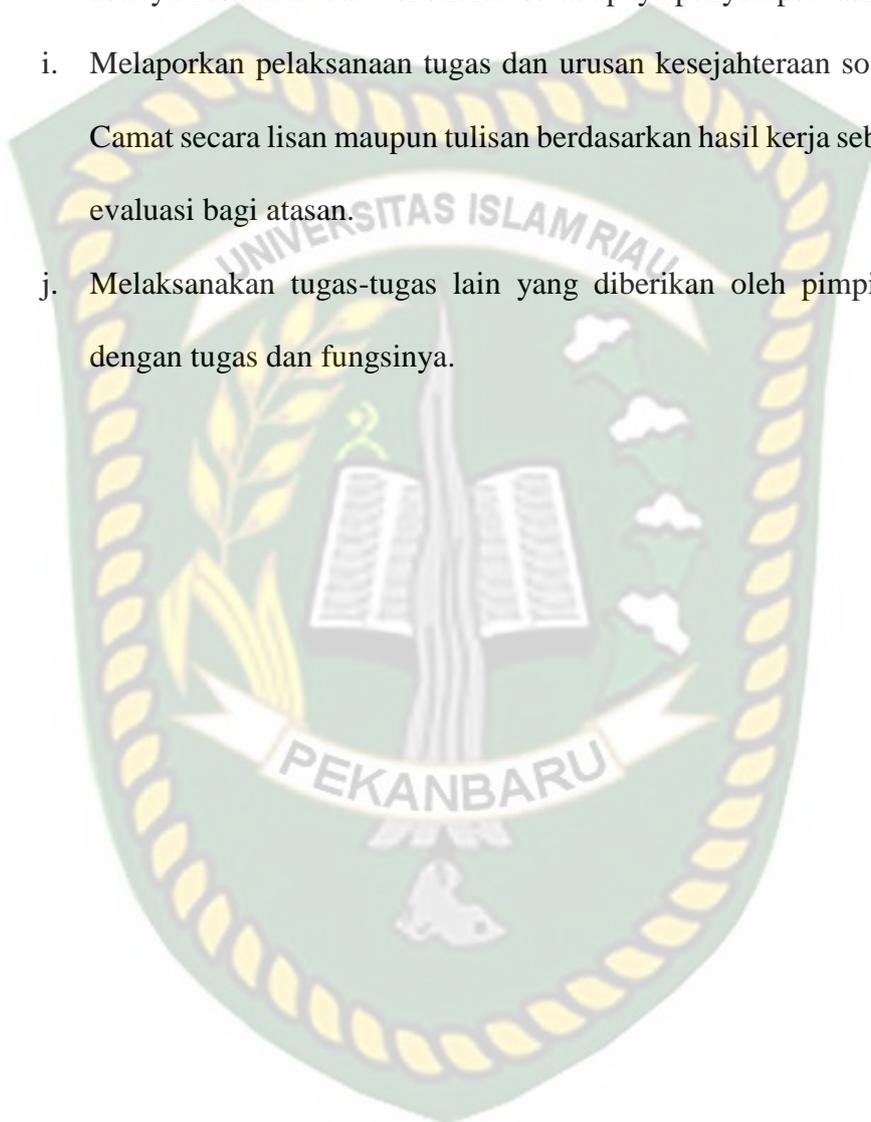
- g. Menyiapkan bahan serta sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan sesuai dengan rencana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Seksi kesejahteraan Sosial

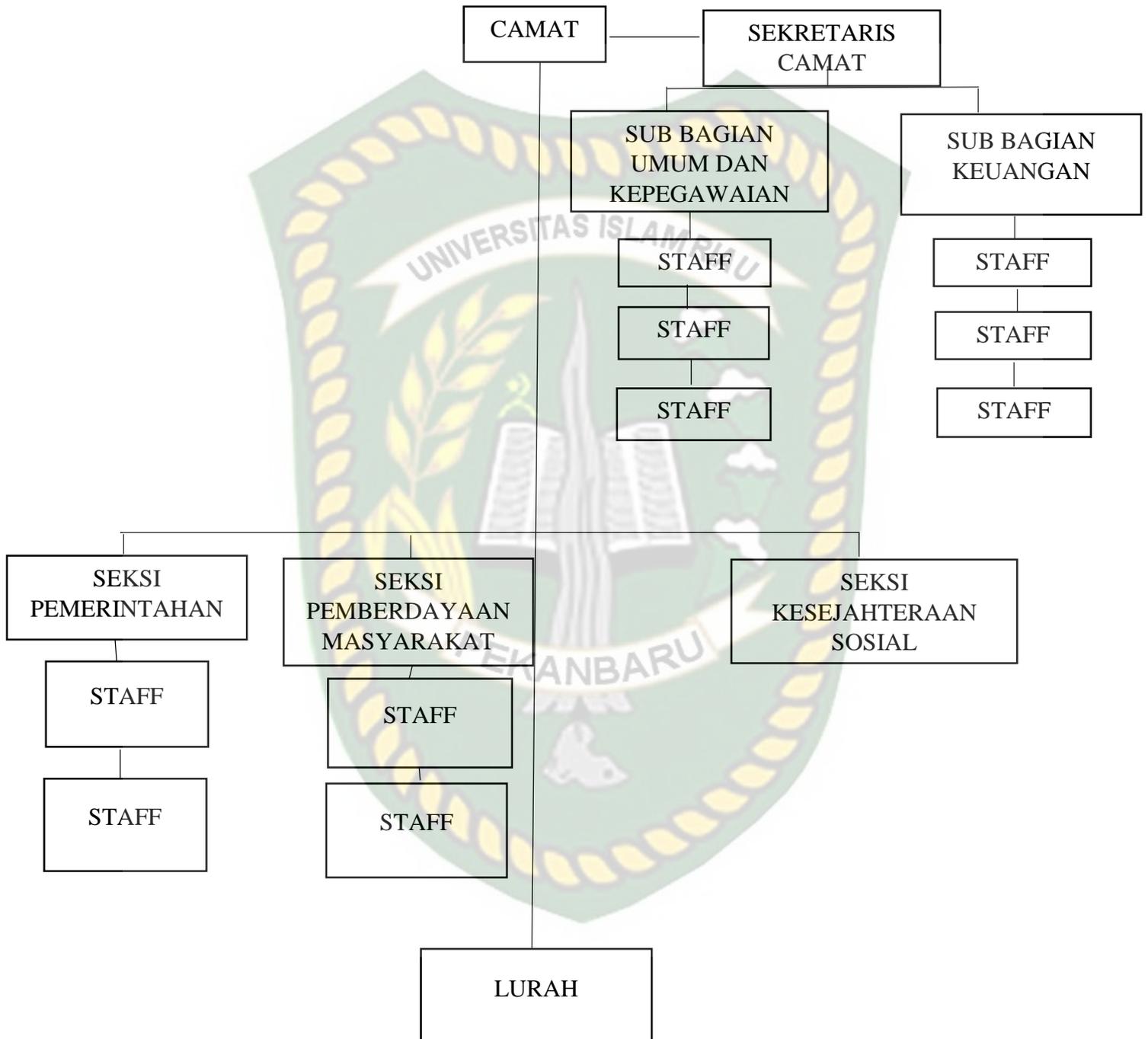
Seksi kesejahteraan social di pimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok pembantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dalam melaksanakan tugas dibidang kesejahteraan rakyat. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan kesejahteraan social
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan social, bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, keluarga berencana, olahraga dan tenaga kerja.
- c. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pembinaan kedupan, keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
- d. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan social.
- e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan bidangnya dibidang kesejahteraan social.
- f. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial.

- g. Membagi tugas kepala bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- h. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan dan kekeliruan serta upaya penyempurnaan.
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas dan urusan kesejahteraan sosial kepada Camat secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Kantor Camat Kecamatan Kampar Kiri Hilir



Sumber : Kantor Camat Kecamatan Kampar Kiri Hilir



BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas responden pada penelitian ini akan dikelompokkan dan disusun terdiri dari jenis kelamin, kelompok umur dan tingkat pendidikan yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan responden pada penelitian ini. selanjutnya akan dijelaskan identitas responden dari mulai jenis kelamin, umur dan pendidikan, pembahasannya sebagai berikut.

1. Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis kelamin disini ialah untuk menggambarkan banyaknya responden yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak ada tujuan yang membandingkan dan melihat pengaruh pengambilan jawaban dan jenis kelamin tersebut, maka dari itu identitas responden penelitian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1 : Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Responden	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	57	81,42%
2	Perempuan	13	18,57%
	Jumlah	70	100%

Data Olahan Penelitian Tahun 2018

Dari table V.1 diatas terlihat bahwa jumlah responden penelitian laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, yang mana laki-laki berjumlah 57 Orang responden atau 81,42% dan perempuan berjumlah 13 orang responden atau 18,57%. kemudian untuk pembagian responden berdasarkan umur dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

2. Responden Menurut Tingkat Usia

Dalam memberikan hasil analisa pada suatu permasalahan, umur seseorang cukup mempengaruhi dalam memeberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Sebagian responden yang digunakan dalam penelitian ini tergolong usia produktif dan dewasa atau matang dalam berfikir, sehingga dianggap mampu memberikan data-data dan informasi yang dibutuhkan. Berikut uraian umur reesponden di Kecamatan Kampar Kiri Hilir.

Tabel V.2 : Jumlah Responden Berdasarkan Tingkatan Usia

No	Umur/Usia	Responden	Persentase
1	21-30 tahun	12	17,14%
2	31-40 tahun	24	34,28%
3	41- 50 tahun	15	21,42%
4	>50tahun	19	27,14%
	Jumlah	70	100%

Data Olahan Penelitian Tahun 2018

Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 12 orang arau 17,14% memiliki umur antara 21-30 tahun, sebanyak 24 orang atau 34,28%

memiliki umur antara 31-40 tahun, sebanyak 15 Orang atau 21,42% memiliki umur antara 41-50 tahun dan 19 Orang atau 27,14% memiliki umur lebih dari 50 tahun (>50 tahun).

Dari tabel jumlah responden berdasarkan tingkat usia diatas dapat dilihat bahwa responden penelitian yang memiliki umur 31-40 tahun yakni sebanyak 24 orang atau 34,28%, disini responden dinilai memiliki usia yang produktif sehingga diharapkan lebih efektif dalam melaksanakan pekerjaan.

3. Responden Menurut Tingkat pendidikan

pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam mendapatkan pekerjaan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula pekerjaan yang mereka dapatkan. Berikut diuraikan mengenai responden berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel V.3 : Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Sekolah Dasar (SD)	23	32,85%
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4	5,71%
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	33	47,14%
4	Sarjana Muda (DII/DIII)	3	4,285
5	Sarjana (S1)	6	8,57%

6	Master (S2)	1	1,42%
	Jumlah	70	100%

Data Olahan Penelitian Tahun 2018

Berdasarkan tabel V.3 diatas dapat dilihat jumlah responden terbanyak yang memiliki latar pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Yaitu sebanyak 33 orang atau sebesar 47,14% dan yang terkecil yaitu yang memiliki latar belakang Master(S2) yaitu sebanyak 1 Orang atau sebesar 1,42%.

B. Hasil dan Pembahasan

Camat adalah pemimpin tertinggi di tingkat kecamatan yang mempunyai peranan sangat penting diwilayah kekuasaannya. Dengan tujuan menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tentram yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat diwilayah tersebut.

Dalam proses penyelenggaraan sistem Pemerintahan koordinasi sangat penting dan dibutuhkan kaarena sangat berepengaruh terhadap jalannya suatu roda Pemerintahan, oleh karena itu aparatur Pemerintah yang merupakan penggerak untuk kemajuan Pemerintahan harus memiliki kesatuan gerak dan langkah dalam segala aspek.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peranan camat dalam mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, setelah dilakukan penyebaran alat pengumpulan data yaitu kuisioner, melakukan wawancara dengan Camat kemudian

melakukan observasi dilapangan serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan ketentraman dan ketertiban, maka hasil dari penelitian akan dibahas secara perindikator penelitian dibawah ini.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal dalam menetapkan tujuan yang akan dicapai. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang datang dari bawah dan kemudian dipadukan pada tingkat kecamatan. Dalam perencanaan selain menetapkan tujuan yang akan dicapai, juga menentukan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam melaksanakan perencanaan kegiatan tersebut, selanjutnya Camat berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan masalah ketentraman dan ketertiban seperti Satpol PP dan kapolsek di Kecamatan Kampar Kiri Hilir.

Untuk menegetahui tanggapan responden berdasarkan perencanaan yang disusun camat pada tabel tanggapan responden sebagai berikut :

Tabel V.4 : Tanggapan Responden Tentang Koordinasi Dalam Perencanaan Pemerintah Kecamatan

No	Item Pedoman yang Dinilai	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Adanya rumusan tujuan yang akan dilaksanakan oleh instansi terkait	28	40	1	69
2	Adanya penetapan waktu dalam pencapaian tujuan	27	42	-	69
3	Adanya standar apabila program kerja sudah tercapai	6	62	1	69
	Jumlah	61	144	2	207

	Presentase	20,33%	48%	0,66%	100%
	Rata-Rata	20	48	1	69

Data Olahan Penelitian Tahun 2018

Dari tabel V.4 diatas dapat ditinjau dari aspek perencanaan, sebanyak 20 orang atau 20,33% mengatakan bahwa Camat dikategorikan berperan melakukan perencanaan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Kemudian responden yang memberikan jawaban cukup berperan sebanyak 48 orang atau 48% hal ini berarti camat dalam melakukan perencanaan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dinilai cukup berperan.

Selanjutnya sebanyak 1 orang atau 0,66% jawaban responden berada pada kategori kurang baik, hal ini berarti camat dalam melakukan perencanaan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dinilai kurang berperan.

Berdasarkan wawancara bersama Camat pada tanggal 05 November 2018. Bapak Edi Harisman selaku Camat Kampar Kiri Hilir mengatakan :

“bahwa koordinasi yang dilakukan Camat sudah cukup berperan dalam melaksanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Hal ini dapat dilihat dari sudah diadakannya pertemuan dengan Lurah, Kepala Desa, Satpol PP di Kecamatan Kampar Kiri Hilir, hanya saja terkadang banyak yang tidak hadir dalam pertemuan yang membahas program-program terkait ketentraman dan ketertiban, sehingga arah dan tujuan dari program ketentraman dan ketertiban tidak berjalan dengan baik. Di karenakan ketidak hadiran Lurah, Kepala Desa Maupun yang terkait disebabkan adanya kegiatan-kegiatan yang harus dihadiri oleh Lurah maupun Kepala Desa, ketika Camat

mengadakan pertemuan dalam melakukan pembahasan terkait kegiatan ketentraman dan ketertiban”.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dinyatakan bahwa tidak adanya perencanaan secara tertulis, hanya ada dalam kegiatan pertemuan secara lisan, sifatnya tidak permanen atau tidak secara rutin. Kegiatan koordinasi dalam komunikasi telah terjalin tetapi wujud perencanaan baru secara lisan. Dari analisis data tabel dan hasil wawancara dengan beberapa responden dan juga berdasarkan dari pengamatan dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam perencanaan yang dilakukan Camat berada pada kategori cukup berperan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis serta analisis jawaban responden melalui kuisisioner dan wawancara penulis menemukan fakta dilapangan yaitu bahwa Camat dalam melakukan rapat koordinasi yang membahas perencanaan apa saja yang dilakukan agar terciptannya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat salah satunya program yang berkaitan dengan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di Desa-desa di Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan penulis juga menemukan dilapangan, masih ada pos ronda yang tidak aktif lagi atau tidak berfungsi dikarenakan tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di Desa-desa di Kecamatan Kampar Kiri Hilir.

2. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud adalah pelaksanaan komunikasi yang dibangun oleh Camat Kecamatan Kampar Kiri Hilir dengan berbagai instansi terkait yakni

Satpol PP, Kelurahan/Desa, Tokoh Adat dan Lapisan masyarakat dalam melakukan wewenang dan bertanggung jawab sehingga masing-masing instansi mengerti apa-apa saja tugas yang dikerjakan terutama dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Komunikasi merupakan faktor terpenting dalam mendorong pelaksanaan tugas dari setiap unsur aparat terkait dalam suatu organisasi termasuk dalam hal ini organisasi pemerintahan Kecamatan. Karena jika komunikasi terjalin dan terlaksana dengan baik antara Camat dan aparat pemerintah lainnya tentu akan menghasilkan kerja yang baik, sehingga tujuan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum dapat terwujud.

Untuk mengetahui tanggapan responden berdasarkan komunikasi yang dilakukan camat pada tabel tanggapan responden berikut ini :

Tabel V.5 : Tanggapan Responden Tentang Koordinasi Dalam Komunikasi Pemerintah Kecamatan

No	Item Pedoman Yang Dinilai	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Jelasnya Pemberian Perintah	22	45	2	69
2	Jelasnya Pesan-Pesan Disampaikan	11	47	11	69
3	Dapatnya Pesan disampaikan	11	41	17	69
	Jumlah	44	133	30	207
	Presentase	14,66%	44,33%	10%	100%
	Rata-Rata	15	44	10	69

Data Olahan Penelitian Tahun 2018

Dari tabel V.5 diatas ditinjau dari aspek komunikasi, sebanyak 15 orang atau 14,66% bahwa Kecamatan berada pada kategori berperan dalam menjalin hubungan komunikasi.

Kemudian sebanyak 44 orang atau 44,33% jawaban responden berada dalam kategori cukup berperan. Hal ini berarti bahwa aparaturnya pemerintah kecamatan merasa peranan Camat dalam melakukan komunikasi dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum tersebut berada pada kategori cukup berperan.

Selanjutnya sebanyak 10 orang atau 10% jawaban responden berada pada kategori kurang berperan, artinya komunikasi yang dilakukan Camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berada pada kategori kurang berperan.

Melalui wawancara dengan Camat, Bapak Edi Harisman beliau mengatakan adapun hal-hal yang dikomunikasikan bersama Lurah, Kepala Desa, Kapolsek maupun yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban umum yaitu berupa program-program kegiatan yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir, adapun isi dari program tersebut yaitu tujuan dari pelaksanaan program-program tersebut, waktu dalam pelaksanaan program dan instansi yang terlibat. Pelaksanaan komunikasi antara Camat dengan Lurah, Kepala Desa maupun Kapolsek sudah berjalan dengan cukup baik. Camat juga mengatakan program-program yang dikomunikasikan seperti melakukan razia ketempat-tempat yang dianggap meresahkan masyarakat, mengatasi kenakalan remaja serta masalah ketentraman dan ketertiban umum di tempat-tempat umum.

Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi yang dilakukan oleh Camat bisa dilakukan secara langsung ataupun melalui surat menyurat. Dari analisis data tabel dan hasil wawancara dengan beberapa responden dan juga berdasarkan dari pengamatan dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam komunikasi yang dilakukan Camat berada pada kategori cukup berperan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis serta analisis responden melalui kuisisioner dan wawancara. Penulis menemukan fakta dilapangan yaitu camat sudah melakukan koordinasi yang maksimal dengan perangkat desa ataupun yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Hal yang dikomunikasikan yaitu dengan mengaktifkan kembali Siskamling di Desa-desa yang selama ini tidak dijalankan lagi dan melakukan ronda di malam hari secara bergantian dengan cara membuat daftar jaga/piket.

3. Pembagian Tugas

Pembagian tugas dimaksudkan sebagai suatu keseluruhan rangkaian kegiatan unit-unit yang merupakan suatu kebulatan yang utuh dalam rangka pencapaian tujuan dalam pelaksanaan koordinasi Camat.

Selain itu bentuk pembagian tugas yaitu adanya penentuan tugas Camat terhadap masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama yakni agar terwujudnya ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Pembagian tugas yang dilakukan Camat merupakan bagian dari kegiatan koordinasi dalam lingkungan kerjanya mestilah dilalkukan dengan melihat

kemampuan dan kondisi instansi terkait sehingga dapat disesuaikan dengan program-program kerja yang dilakukan.

Untuk mengetahui tanggapan responden berdasarkan pembagian tugas yang dilakukan Camat dapat dilihat pada tabel tanggapan responden berikut ini:

Tabel V.6 : Tanggapan Responden Tentang Koordinasi Dalam Pembagian Tugas Pemerintah Kecamatan

No	Item Pedoman Yang Dinilai	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Adanya perincian tugas dari masing-masing instansi terkait	10	56	3	69
2	Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab	10	59	-	69
3	Adanya garis komando	5	62	2	69
	Jumlah	25	177	5	207
	Presentase	8,33%	59%	1,66%	100%
	Rata-Rata	8	59	2	69

Data Olahan Penelitian Tahun 2018

Dari tabel V.6 diatas ditinjau dari aspek pembagian tugas, bahwa sebanyak 8 orang atau 8,33% Camat berada pada kategori berperan dalam pembagian tugas.

Kemudian sebanyak 59 orang atau 59% jawaban responden berada pada kategori cukup berperan. Hal ini berarti aparat pemerintah kecamatan merasa Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum, baik perintah langsung dari Camat ataupun yang mewakili, kepada setiap instansi agar menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum berada pada kategori cukup berperan.

Selanjutnya sebanyak 2 orang atau 1,66% jawaban responden berada pada kategori kurang baik, artinya sebagian aparat pemerintahan di kecamatan

maupun masyarakat menilai pembagian tugas yang diberikan pihak Kecamatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum belum terlaksana dengan baik.

Melalui wawancara dengan Camat, Bapak Edi Harisman beliau mengatakan Camat tidak secara rutin berkoordinasi secara langsung kepada Satpol PP dalam membahas kegiatan ketentraman dan ketertiban. Camat juga mengatakan terkadang dalam memberikan perintah untuk melakukan suatu kegiatan kepada Satpol PP secara surat menyurat. Camat juga mengatakan dalam melakukan suatu kegiatan pihak Satpol PP terkadang menjalankan tanpa koordinasi ke pihak Kecamatan terlebih dahulu.

responden dan juga berdasarkan dari pengamatan dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam pembagian tugas yang dilakukan Camat berada pada kategori Cukup Berperan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis serta analisis responden melalui kuisisioner dan wawancara. Penulis menemukan fakta dilapangan yaitu bahwa Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Trantib, terkadang dalam menjalankan tugas tanpa koordinasi ke Camat terlebih dahulu.

4. Pengawasan

pengawasan dalam penelitian ini adalah usaha-usaha yang dilakukan Camat dalam menjaga apa-apa yang telah direncanakan dan pembagian tugas yang telah diberikan pada masing-masing instansi terkait terutama menyangkut dalam permasalahan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat. Dalam

pengertian lainnya diketahui bahwa pengawasan ialah suatu proses penilaian yang berpedoman pada perencanaan, tindakan maupun penyelesaian atas apa yang terjadi.

Untuk mengetahui tanggapan responden berdasarkan pengawasan yang dilakukan Camat dapat dilihat pada tabel tanggapan responden berikut ini :

Tabel V.7 : Tanggapan Responden Tentang Koordinasi Dalam Pengawasan Pemerintah Kecamatan

No	Item Pedoman Yang Dinilai	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Dilakukan pemantauan terhadap rencana yang telah ditetapkan	28	41	-	69
2	Adanya perbaikan atas kesalahan yang dilaporkan	10	55	4	69
3	Adanya pengawasan langsung kelapangan	22	47	-	69
	Jumlah	60	143	4	207
	Presentase	20%	47,66%	1,33%	100%
	Rata-Rata	20	48	1	69

Data Olahan Penelitian Tahun 2018

Dari tabel V.7 diatas ditinjau dari aspek pengawasan, bahwa sebanyak 20 Orang atau 20%, bahwa Camat berada pada kategori berperan dalam pembagian tugas.

Kemudian responden yng memberikan jawaban cukup berperan sebanyak 48 orang atau 47,66%. Hal ini berarti bahwa responden merasa Peranan Camat dalam pengawasan terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum berada pada kategori cukup berperan.

Selanjutnya sebanyak 1 orang atau 1,33% jawaban responden berada pada kategori kurang berperan, artinya responden menilai pengawasan yang dilakukan pihak Kecamatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum kurang berperan.

Melalui wawancara dengan Camat, Bapak Edi Harisman beliau mengatakan selama ini pelaksanaan pengawasan terhadap upaya penegakan ketentraman dan ketertiban umum Di Kecamatan Kampar Kiri Hilir telah dilakukan sebagaimana mestinya, kendala maupun hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Tidak Ada. Akan tetapi permasalahan nya menyangkut pada dana operasional seperti uang minyak sepeda motor untuk melakukan survai kedesa-desa yang sangat jauh yang menjadi hambatan Pemerintah Kecamatan dalam melakukan pengawasan terhadap upaya penegakan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir.

Berdasarkan hasil tabel dan wawancara maka penulis menyatakan bahwa peranan Camat dalam pengawasan atas program yang dilakukan berada pada kategori cukup berperan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis serta analisis responden melalui kuisisioner dan wawancara. Penulis menemukan fakta dilapangan bahwa dalam melakukan pengawsan, Camat tidak secara maksimal menjalankan pengawasan ke Desa-desa, ditambah lagi Camat tidak mau mengeluarkan anggaran biaya operasional kepada pegawai kantor Camat yang terkait Trantib sehingga tidak berjalan secara efektif.

Dari uraian diatas data tabel dan masing-masing indikator variabel sebagaimana dijelaskan diatas maka secara keseluruhan dapat dilihat rekapitulasi data masing-masing indikator variabel sebagai berikut :

Tabel V.8 : Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Peranan Camat Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

No	Item Penilaian	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Perencanaan	20 (20,33%)	48 (48%)	1 (0,66%)	69 (100%)
2	Komunikasi	15 (14,66%)	44 (44,33%)	10 (10%)	69 (100%)
3	Pembagian Tugas	8 (8,33%)	59 (59%)	2 (1,66%)	69 (100%)
4	Pengawasan	20 (20%)	48 (47,66)	1 (1,33%)	69 (100%)
	Jumlah	63	199	14	280
	Persentase	15,75%	49,75%	3,25%	100%
	Rata-Rata	16	50	3	69

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2018

Dari tabel V.8 diatas dapat diterangkan bahwa peranan Camat dalam mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabup.aten Kampar berda pada kategori “Cukup Berperan” , hal ini dilihat dari tanggapan responden. Dari 70 responden yang berada pada kategori baik sebanyak 16 orang atau 15,75%. Selanjutnya pada kategori cukup berperan sebanyak 50 orang atau 49,75%. Dan yang berada pada kategori kurang baik sebanyak 3 orang atau 3,25%.

Berdasarkan dengan teknik pengukuran yang telah digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan persentase 49,75% berada pada interval 34-66% dengan kategori Cukup Berperan.

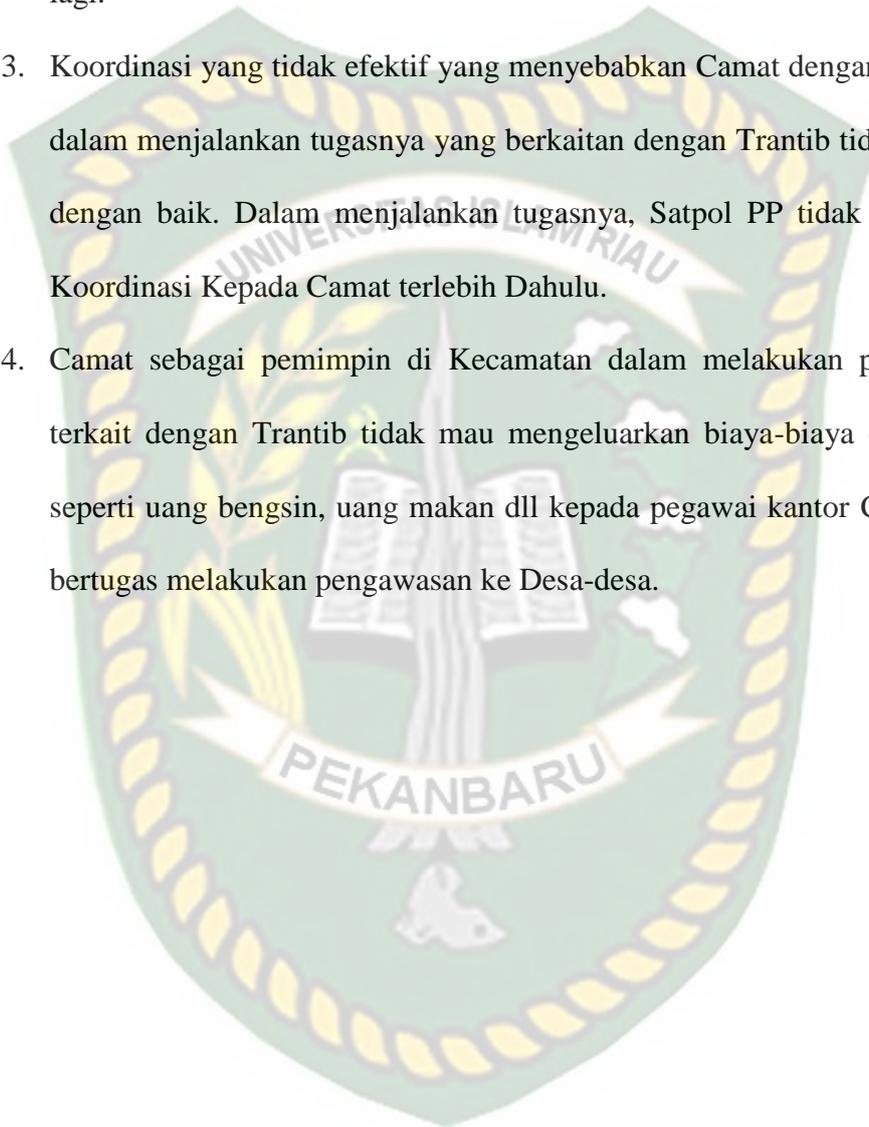
Berdasarkan hasil analisis data tabel dan hasil wawancara dengan responden dan juga berdasarkan dari pengamatan dan dokumentasi penulis dapat menyimpulkan bahwa koordinasi dalam perencanaan, koordinasi dalam komunikasi, koordinasi dalam pembagian tugas dan koordinasi dalam pengawasan yang dilakukan Camat berada pada kategori Cukup Berperan dengan Persentase 49,75%.

C. Faktor Penghambat Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

Terkait dengan tingginya angka gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kurang optimalnya koordinasi di Kecamatan Kampar Kiri Hilir, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya peranan Camat dalam mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, yaitu:

1. Banyak dari komponen Perangkat Desa maupun yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban tidak menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh camat. Dikarenakan ada kegiatan lain yang harus dihadiri oleh perangkat Desa maupun yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban Umum.

2. Camat beserta Perangkat Desa maupun yang terkait dengan ketentraman dan Ketertiban harus focus dalam membangun kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di Desa-desa, yang selama ini tidak difungsikan lagi.
3. Koordinasi yang tidak efektif yang menyebabkan Camat dengan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan Trantib tidak berjalan dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP tidak melakukan Koordinasi Kepada Camat terlebih Dahulu.
4. Camat sebagai pemimpin di Kecamatan dalam melakukan pengawasan terkait dengan Trantib tidak mau mengeluarkan biaya-biaya operasional seperti uang bensin, uang makan dll kepada pegawai kantor Camat yang bertugas melakukan pengawasan ke Desa-desa.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan terkait dengan Peranan Camat Dalam mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan kampar kiri hilir, berdasarkan indikator penelitian yang penulis gunakan yakni indikator variabel perencanaan, komunikasi, pembagian tugas dan pengawasan. Penulis mendapatkan hasil bahwa peranan Camat terkait ketentraman dan ketertiban umum Cukup Berperan.
2. Faktor yang menjadi hambatan Terkait Peranan Camat Dalam mengkoordinasi kan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar sebagai berikut :
 1. Banyak dari komponen Perangkat Desa maupun yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban tidak menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh camat. Dikarenakan ada kegiatan lain yang harus dihadiri oleh perangkat Desa maupun yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban Umum.
 2. Camat beserta Perangkat Desa maupun yang terkait dengan ketentraman dan Ketertiban harus fokus dalam membangun kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di Desa-desa, yang selama ini tidak difungsikan lagi.

3. Koordinasi yang tidak efektif yang menyebabkan Camat dengan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan Trantib tidak berjalan dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP tidak melakukan Koordinasi Kepada Camat terlebih Dahulu.
4. Camat sebagai pemimpin di Kecamatan dalam melakukan pengawasan terkait dengan Trantib tidak mau mengeluarkan biaya-biaya operasional seperti uang bensin, uang makan dll kepada pegawai kantor Camat yang bertugas melakukan pengawasan ke Desa-desa.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan terkait dengan peranan camat dalam mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, penulis banyak menemukan permasalahan-permasalahan terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk itu penulis memberikan saran yang diharapkan dapat membawa dampak positif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Antara lain sebagai berikut:

1. Sehatusnya Camat memilih waktu yang tepat dalam menentukan kapan rapat tersebut dilaksanakan agar semua hadir dalam pembahasan terkait ketentaman dan ketertiban umum di kecamatan Kampar kiri hilir.
2. Siskamling di desa-desa di Kecamatan Kampar Kiri Hilir harus diaktifkan kembali untuk itu masyarakat berperan penting dalam kegiatan ini dan masyarakat disarankan melakukan ronda di malam hari agar terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3. Diharapkan kepada Satpol PP dalam menjalankan tugas nya terlebih dahulu berkoordinasi dengan camat agar kegiatan nya berjalan dengan efektif dan maksimal.
4. Untuk melakukan pengawasan ke desa-desa akan lebih baik Camat turun langsung ke lapangan agar mendapatkan hasil yang jelas terkait ketentraman dan ketertiban umum.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Budiardjo, Meriam. 2005. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Davis, Keith. 2002. *Manajemen SDM Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Daryanto, Abdullah. 2013. *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Ermaya,. 2000. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali
- Giroth. 2004. *Status dan Peran Pendidikan Pamong Praja Indonesia*. Jakarta: Indra Praharta
- Handoko, T.hani. 2003. *Manajemen Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- _____, 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Edisi Revis. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyasa. 2002 . *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Ndraha, Taliziduhu. 2003, *Kybernologi (Pemerintahan Baru I)*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____,2005. *Kybernologi Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____,2010. *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____,2011. *Kybernologi (Pemerintahan Baru II)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- _____,2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi*

Daerah (Edisi Revisi). Jakarta: Grasindo

Rianse, Usman. 2012. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta

Sedarmayanti. 2004. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju

Soekanto, Soejono. 2001. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

_____, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Grafindo Persada

Syafiie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta

_____, 2003. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju

_____, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Aditama

_____, 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung: Mandar Maju

Dokumentasi

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang kecamatan

Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Kampar

Buku *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Hasil Penelitian, Skripsi, Kertas Kerja Mahasiswa (KKM)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

Skripsi Nanang Deswanto. 2014. *Peranan Camat Sebagai Koordinator Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu*

